



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 31 Juli 2021

Halaman: 1

Menyerah

■ Bendera Putih Berkibar di Malioboro

TAK MAMPU BERTAHAN

- Bendera putih tanda menyerah dipasang PKL di tepi Jalan Malioboro.
- Kondisi pandemi akhir-akhir ini membuat mereka tidak bisa bergerak.
- Dagangan tidak laku membuat mereka lebih miskin, belum dengan ancaman terpapar Covid-19.
- Bantuan pun belum disalurkan karena lumpuh dalam kondisi pelat pesanan virus corona yang terus melaju.
- Di Malioboro ada 11 paguyuban PKL dengan anggota lebih kurang 2.000 pedagang.
- Hingga kini baru sekitar 1.000 pedagang dari dua paguyuban yang sudah tententah bantuan.
- Tidak semua pelaku usaha dan paguyuban di Malioboro tergabung atau berbadan hukum koperasi.
- Pemda DIY menyatakan sudah menyiapkan dana beberapa skala untuk membantu PKL menghadapi ancaman PPKM.
- Sementara ini, pengurangan risiko dilakukan melalui koperasi yang mendang pelaku usaha.

Bukan protes, imbauan supaya mengerti perasaan PKL bahwa ekonomi lumpuh total tidak ada pedagang tidak ada pengunjung.

Desio Hartonowati
PPLM

YOGYA, TRIBUN - Pemandangan berbeda ditemui di sepanjang Jalan Malioboro Jumat (30/7) pagi. Tampak ratusan bendera putih dipasang rapi di sisi timur jalan termasyhur tersebut. Itu merupakan aksi simbolik yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro untuk merespons situasi yang mereka hadapi saat ini.

Bendera putih menandakan bahwa mereka sudah

● ke halaman 11

Nilai Berita	Sifat	Ti
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Un
☐ Positif	☐ Segera	☐ Un

Menyerah

• Sambungan Hal 1

menyerah dengan kondisi perekonomian yang kian hari semakin memburuk. Selain itu, simbol itu juga menandakan perasaan berkahang.

"Bendera putih dipahami oleh masyarakat kita sebagai tanda berkahang. Hal itu yang hari-hari ini mulai merayapi komunitas dan pelaku usaha di Maliboro," jelas Ketua Paguyuban Pedagang Lesahan Maliboro (PPLM), Desio Hartonowati saat ditemui di Kawasan Maliboro, Jumat (30/7).

"Penghasilan mace total, kehidupan, keluarga kritis, utang menumpuk, bantuan terasa jauh bahkan penerapan PPKM Darurat seolah jadi pukulan telak (bagi) PKL," tambahnya. Mereka pun mengharapkan adanya terobosan kebijakan luar biasa dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY di tengah situasi krisis seperti saat ini.

Desio menjelaskan, Pemda DIY memang telah menyediakan skema relaksasi bagi para PKL, yakni dengan menyiapkan bantuan modal bergulir yang disalurkan melalui koperasi. Namun belum seluruh pelaku usaha di kawasan itu mendapat jatah bantuan. Sebab, tidak seluruh pelaku usaha tergabung dalam koperasi.

"Sementara relaksasi dana bantuan yang diturunkan PKL yang telah diturunkan dari 26 Juli sampai 29 Juli tidak terlalu memberi dampak positif, maka wajar kami dan Maliboro berkahang," paparnya.

Menurutnya, sejauh ini telah ada dua koperasi yang akan mendapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan sembilan paguyuban lain tidak bisa diakomodasi karena tidak berkahang hu-

kum koperasi. "Kami berharap dan meminta kepada gubernur untuk mencari terobosan agar paguyuban yang tidak berkahang hu-kum koperasi bisa mengakses bantuan modal bergulir tanpa bunga," jelas Desio.

Lebih jauh, pihaknya juga kecewa karena pemerintah tak kunjung memberi toleransi waktu berjualan khusus bagi PKL lesahan di Maliboro. Saat ini pemerintah tetap mewajibkan pelaku usaha untuk tak berjualan di atas pukul 20.00 WIB.

Padahal PKL lesahan biasanya baru berjualan sekitar pukul 18.30 WIB. Karena tak ada kelonggaran, para PKL pun memutuskan untuk tak berjualan meski pemerintah telah memberi izin untuk berkahang.

"Lesahan ini jadi kelompok yang paling menderita karena sejak kebijakan pembatasan tahun 2020 sampai PPKM 2021 tidak pernah terakomodir terkait kebijakan kelonggaran toleransi," paparnya. "Kami berharap supaya setelah tanggal 2 Agustus kami diberi kelonggaran berjualan sampai jam 23.00. Kita tetap tidak bisa jualan dengan rentan waktu 1,5 jam, sama saja kita tutup," lanjutnya.

Menurutnya, pemasangan bendera putih ini bukanlah bentuk protes kepada pemerintah, tetapi merupakan ungkapan perasaan para pedagang bahwa mereka merasa kesulitan menghadapi pandemi, yang membuat ekonomi mereka lumpuh.

"Bukan protes, imbauan supaya mengerti perasaan PKL bahwa ekonomi lumpuh total tidak ada pedagang tidak ada pengunjung," kata dia. "Menyerah secara universal. Kami enggak bisa berbuat apa-apa lagi," ungkapnya.

Bantuan modal dibutuhkan para pedagang mengingat dari awal pandemi

hingga saat ini sudah ada 3 ribuan pedagang yang terdampak. Sebagian besar dari mereka sudah kehilangan modal karena terge-rus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mengetuk hati

Sementara itu, seorang PKL Maliboro, Dimanto (64) mengungkapkan, sejak pandemi Covid-19, dirinya belum mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah. Aksi pemasangan bendera putih ini sekaligus untuk mengetuk hati pemerintah agar memberikan sedikit bantuan kepada para pedagang di Maliboro.

"Ya kalau kaki lima parah, terutama kuliner. Karena sejak Covid-19 ada belum pernah ada bantuan apapun dari pemerintah. Kita mengetuk hati pemerintah supaya memberikan sedikit bantuan kepada terutama pedagang kaki lima yang ada di Maliboro," katanya.

Kondisi saat ini, menurutnya, cukup berat, karena sekarang ini diperbolehkan berjualan tetapi akses masuk Maliboro masih ditutup sehingga belum banyak pengunjung yang datang. "Kita membuat makanan tok tapi tak bisa jual. Pembeli belum ada. Kalau akses dibuka mungkin banyak pembelinya. Kalau sekarang ditutup belum ada pembeli," katanya. "Kita jualan sehari bisa tutup kulakan saja sudah Alhamdulillah," katanya.

Diturunkan Satpol PP

Pemasangan bendera putih simbol ternyata tak berlangsung lama. Pasalnya, tak lebih dari dua jam usai bendera itu dipasang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta datang untuk menurunkan puluhan bendera tersebut.

Kasatpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto mengatakan, alasan utama dilakukan penertiban itu karena letak bendera telah

melanggar salah Peraturan Daerah (Perda) tentang pemasangan atribut atau simbol-simbol di kawasan tertentu. "Ditertibkan karena melanggar perda. Enggak boleh ada simbol-simbol gitu di kawasan Jalan Maliboro," katanya, saat dihubungi *Tribun Jogja*, Jumat (30/7).

Selain itu, Agus juga mengatakan untuk saat ini pemerintah sudah memahami bahwa kondisi ekonomi sekarang sedang sulit. "Sekarang gini, kayak gitu kan simbol angkat tangan, minta tolong. Pemerintah udah ngerti. Jadi simbolisasi kayak gitu enggak perluah," jelas dia.

Agus melanjutkan, pemerintah memahami kesulitan para pedagang dalam mencari nafkah di tengah pandemi Covid-19 saat ini. "Di waktu saat ini siapa sih yang enggak mau berekspresi. Saya juga mau berekspresi, tapi enggak usah gitu. Itu kan ada UPT, sampaikan, bicarakan," terangnya.

Dari keterangannya, bendera putih itu ditertibkan pada Jumat pagi sekitar pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.00. Pihak Satpol PP dibantu para personel kepolisian dari Polresta Yogyakarta menurunkan bendera simbol menyerah itu.

Menurut informasi di lapangan, bendera putih tersebut dipasang sekitar pukul 06.00 dan tak kurang dari dua jam kemudian diturunkan oleh petugas Satpol PP Kota Yogyakarta. Meski melanggar perda, pihak Satpol PP tidak memberlakukan sanksi apa pun kepada pemasang bendera tersebut. "Enggaklah. Kami memahami, tidak ada pendekatan ke sana. Hanya kami tertibkan dan pihak UPT Maliboro sudah berbicara dengan mereka (pedagang)," jelasnya. (tro/hda/kpe)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005